

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam aktivitasnya tidak terlepas dari kebutuhan terhadap ruang yang merupakan tempat manusia tinggal dalam upaya untuk meningkatkan status dan kualitas hidupnya. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini menimbulkan peningkatan kebutuhan akan ruang, dimana perubahan perilaku dan tuntutan aspirasi masyarakat menyebabkan perubahan pola dalam membentuk kebijaksanaan tata ruang. Idealisasinya ruang menjadi keharusan mutlak yang menggambarkan aspirasi masyarakat pengguna dan pelaku kegiatan ruang. Namun begitu, hal-hal prinsip pembentuk kebijaksanaan tata ruang cenderung tetap eksis dalam menata ruang untuk mendapatkan perimbangan yang harmonis antara kebutuhan pengembangan dengan daya dukung sumberdaya alam dan manusianya.

Terdapat beberapa kebijaksanaan tata ruang yang telah disusun sebagai pengarah dasar perkembangan wilayah Kabupaten Sumedang, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2002 - 2012 Kabupaten Sumedang. Dimana penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (UU No. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang). Kebijakan RTRW ini merupakan kebijakan pokok yang harus ditindaklanjuti dengan kebijaksanaan tata ruang yang lebih terperinci lagi agar kebijaksanaan RTRW tersebut menjadi kebijaksanaan yang lebih informatif dan

aplikatif dalam menentukan arah perkembangan ruang kawasan wilayah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, sekitar 45 km Timur Laut Kota Bandung. Berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di Utara, Kabupaten Majalengka di Timur, Kabupaten Garut di Selatan, Kabupaten Bandung di Barat Daya, serta Kabupaten Subang di Barat. Bagian Barat Daya wilayah Kabupaten Sumedang merupakan kawasan perkembangan Kota Bandung. Kabupaten Sumedang memiliki luas 152.220 Ha dengan ketinggian tempat 26 m – 100 m dpl, sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan dan perbukitan, kecuali di sebagian kecil wilayah Utara berupa dataran rendah. Kabupaten Sumedang memiliki 26 kecamatan dan memiliki 262 desa. Jumlah penduduknya mencapai 1.112.433 jiwa (Badan Pusat Statistik Kab. Sumedang, 2007) dengan kepadatan penduduk 717 jiwa/km².

Dinamika perkembangan keruangan Kabupaten Sumedang banyak mengalami perubahan yang cukup mendasar sehingga membawa pengaruh pula pada kebijaksanaan pemerintah dalam penataan ruang. Perubahan dalam kebijakan penataan ruang tersebut salah satunya dikarenakan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Sumedang banyak mengalami perubahan sehingga menuntut keserasian dan keselarasan dengan penataan ruang yang cenderung statis. Sehingga pada pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan ataupun ketidaksesuaian dengan pola kehidupan yang baru.

Apabila dilihat dari segi fisik, Kabupaten Sumedang mengalami perkembangan wilayah yang diindikasikan dengan perubahan-perubahan luasan

penggunaan lahan terutama yang berhubungan dengan pembangunan-pembangunan fisik sebagai penunjang kegiatan. Ketersediaan lahan dipengaruhi juga oleh pertumbuhan penduduk yang menuntut adanya peningkatan, penambahan, dan pengembangan dari sarana dan prasarana yang dapat melayani kebutuhannya. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi pula terhadap perubahan atau peruntukan lahan di wilayah ini, seperti adanya zona industri, pembangunan jalan tol, (jalan lingkar baik selatan maupun utara), rencana pembangunan Waduk Jatigede, rencana peningkatan status wilayah yang meliputi Kecamatan Jatinangor, Cimangung dan sebagian wilayah kecamatan Tanjungsari menjadi kota administratif Jatinangor dan kebijaksanaan lainnya.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan implementasi dari pembangunan daerah dengan tujuan yang menyangkut kepentingan manusia yang harus diperjuangkan demi tercapainya kesejahteraan. Salah satu indikator kesejahteraan adalah perekonomian penduduk yang diartikan dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan PDB pada satu tahun tertentu melebihi tingkat pertumbuhan penduduknya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi ukuran bagi tingkat kemakmuran Kabupaten Sumedang. PDRB per kapita setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang berbeda-beda dan kecenderungannya meningkat, akan tetapi data ini tidak dapat digunakan secara langsung dalam pengukuran pendapatan sehingga tidak dapat menentukan tingkat kemakmuran suatu wilayah. Perbedaan potensi sumber daya alam dan faktor produksi setiap kecamatan menjadi penyebab utama perbedaan perkembangan perekonomian.

Oleh karena itu, dalam pembangunan wilayah Kabupaten Sumedang yang menyeluruh perlu kebijaksanaan tata ruang yang lebih terperinci, agar dapat menjadi kebijaksanaan yang lebih informatif dan aplikatif dalam menentukan arah perkembangan ruang kawasan wilayah Kabupaten Sumedang. Sehingga dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga akan banyak membawa pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumedang.

B. Rumusan Masalah

Adapun untuk mengungkapkan permasalahan mengenai pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap perubahan tata ruang Kabupaten Sumedang, terdapat beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana kesesuaian tata ruang dengan kondisi *existing* penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kesesuaian faktual antara tata ruang dengan penggunaan lahan Kabupaten Sumedang.
2. Mengetahui secara analitik pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan pengetahuan mengenai kondisi faktual tata ruang wilayah dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat yang menjadi subjek perubahan ruang.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumedang.
3. Sebagai penelitian awal atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengenai tata ruang.
4. Menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan kegeografian, khususnya bagi dunia pendidikan pada pokok bahasan yang berhubungan dengan pola keruangan desa dan kota.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul **“Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Sumedang dan Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan”**. Judul ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sosial ekonomi penduduk yang terjadi di daerah penelitian dengan perkembangan tata ruang Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 2002-2012.

Untuk menghindari penafsiran yang salah, maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengaruh kondisi sosial ekonomi, dimana pengaruh adalah efek atau akibat yang timbul baik itu yang menguntungkan atau merugikan yang disengaja ataupun tidak dari suatu pekerjaan dalam hal ini sosial ekonomi

masyarakat yang mengalami perkembangan untuk menilai kapasitas perkembangan, memperkirakan arah perkembangan masa yang akan datang, dan menentukan alternatif terpilih dalam pemanfaatan ruang.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Perubahan perilaku dan tuntutan aspirasi masyarakat menyebabkan perubahan pola dalam membentuk kebijaksanaan tata ruang. Idealisasinya ruang menjadi keharusan mutlak yang menggambarkan aspirasi masyarakat pengguna dan pelaku kegiatan ruang. Namun begitu, hal-hal prinsip pembentuk kebijaksanaan tata ruang cenderung tetap eksis dalam menata ruang untuk mendapatkan perimbangan yang harmonis antara kebutuhan pengembangan dengan daya dukung sumberdaya alam dan manusianya. sehingga nantinya akan memperkuat pembangunan dan perkembangan daerah dalam bidang sosial ekonomi serta kesejahteraan yang merata pada masyarakat.
2. Kondisi sosial ekonomi dalam keterkaitannya dengan perubahan tata ruang wilayah
 - a. Tingkat pendidikan. Pendidikan berdasarkan pendekatan ekonomi dipandang sebagai *human investment* atau usaha penanaman modal pada diri manusia untuk mempertinggi mutu tenaga kerja, sehingga mempertinggi mutu barang dan/ atau jasa (Syaripudin, 2006:29).
 - b. Tingkat kesehatan. Menurut Hatta S. (1987: 25) kondisi kesehatan meliputi : Aspek kelahiran dan kondisi gizi, penyakit menular dan infeksi,

pengetahuan higienis dan sanitasi lingkungan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

- c. Tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan merupakan indikator yang banyak dipakai untuk melihat pembangunan secara umum. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam mengatur perilaku ekonomi masyarakat itu sendiri.
 - d. Mata pencaharian penduduk, diartikan sebagai aktifitas ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian masyarakat disuatu daerah dipengaruhi oleh faktor alam dan tata nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
 - e. Sarana dan prasarana, yang dimaksud disini adalah kepemilikan akan barang-barang yang menjadi fasilitas dalam menunjang kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah rumah sakit, sekolah, sarana peribadatan, pasar, puskesmas, rumah pribadi, alat transportasi, dan lain-lain.
3. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan ataupun tidak. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai suatu proses yang ketiganya tersebut merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
 4. Adapun yang dimaksud Kabupaten Sumedang pada penelitian adalah merupakan kota administratif yang termasuk ke dalam wilayah Jawa Barat yang memiliki 26 kecamatan.

F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar (asumsi) menurut Pabundu (2005:18) adalah suatu pernyataan pokok yang dibuat dalam suatu penelitian dan secara umum dapat diterima kebenarannya walaupun tanpa pembuktian. Anggapan dasar pada penelitian ini adalah:

1. Perubahan perilaku dan tuntutan aspirasi masyarakat menyebabkan perubahan pola dalam membentuk kebijaksanaan tata ruang
2. Dinamika perkembangan keruangan banyak mengalami perubahan yang cukup mendasar dikarenakan adanya perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang menjadi unsur pokok keruangan. sehingga membawa pengaruh pula pada kebijaksanaan pemerintah dalam penataan ruang. Daerah yang mengalami perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup pesat menuntut pemanfaatan ruang yang makin banyak.
3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan memicu tingkat kesejahteraannya dan pengendalian pemanfaatan ruang itu sendiri.

G. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi memberikan pengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada Laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Definisi Operasional, Asumsi, Hipotesis, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, terdiri atas: Konsep Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang, Komponen Tata Ruang, Ruang Lingkup Perencanaan Tata Ruang, Faktor-Faktor Penunjang Tata Ruang, Perubahan Fungsi Lahan Dalam Tata Ruang, dan Kondisi Sosial Ekonomi dalam Penataan Ruang.

Bab III Prosedur Penelitian, terdiri atas: Metode Penelitian, Populasi Dan Sampel, Variabel Penelitian, Instrumen Penelitian, dan Tehnik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri atas: Deskripsi Wilayah Penelitian, Tata Ruang Kabupaten Sumedang, Kesesuaian Antara Tata Ruang dan *Existing* Penggunaan Lahan, dan Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumedang.

Bab V Kesimpulan dan Saran terdiri atas: Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil penelitian sehingga dapat ditemukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan.